



KEPUTUSAN WALI KOTA

Nomor 000.7.2 / 298 / 2026

Lampiran VIII

PERUBAHAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 298 / 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026;
a. Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan
b. Bab IV : Penutup.



- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

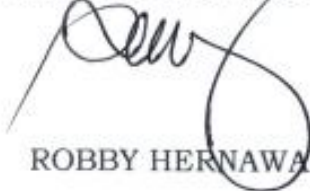
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 September 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.





PEMERINTAH KOTA SALATIGA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2026

(PERUBAHAN RENJA TAHUN 2026)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

1.1 Latar Belakang.....3

1.2.Landasan Hukum.....6

1.3.Maksud dan Tujuan 9

1.4.Sistematika Penulisan.....10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2024 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
.....14

2.2.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
.....14

2.3.Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota
Salatiga Tahun 2026 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ..20

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....20

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....21

3.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....24

BAB IV PENUTUP 29

BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 dan ditetapkan sebagai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Salatiga Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini menjadi bagian penting dalam menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah, perencanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penganggaran. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penyesuaian tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja, hasil reviu APIP, hasil Fasilitasi Gubernur, serta ketentuan dan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan penyesuaian rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan akhir Tahun 2026.

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Tahun 2026 yang disusun sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perubahan arah kebijakan pembangunan, serta kebutuhan penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, perlu memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana di Kota Salatiga.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tanggal 7 Agustus 2026. Selanjutnya, melalui Surat Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 000.7/3282 tanggal 21 Agustus 2026 tentang Penyusunan Perubahan RENJA PD 2026, Perangkat Daerah diminta segera menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026. Surat Sekretaris Daerah tersebut secara tegas menyatakan bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026 mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 000.7/613 tanggal 30 Juni 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Dengan demikian, Surat Edaran Wali Kota dan Surat Sekretaris Daerah menjadi satu kesatuan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026. Surat Edaran Wali Kota menjadi pedoman pada tahap penyusunan rancangan, sedangkan Surat Sekretaris Daerah memberikan penegasan dan penyesuaian pada tahap penyusunan dokumen setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ditetapkan.

Salah satu penyesuaian tersebut adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada tahap penyusunan awal menggunakan kondisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, sedangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja yang disusun setelah perkembangan tahapan perencanaan dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, evaluasi diperbarui sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Surat Sekretaris Daerah secara khusus menetapkan BAB II mengenai evaluasi Rencana Kerja sampai dengan

Triwulan II Tahun 2026, termasuk realisasi APBD dan keterkaitannya dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyesuaian tersebut diperlukan agar dokumen Perubahan Rencana Kerja menggambarkan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mutakhir serta dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penyesuaian sampai dengan akhir Tahun 2026.

Selain penyesuaian periode evaluasi, substansi Perubahan Rencana Kerja juga diperkuat dengan adanya Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026 serta Rencana Kerja Dukungan Pencapaian IKU dan IKK. Kedua substansi tersebut menjadi bagian dari BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah sebagaimana diarahkan dalam Surat Sekretaris Daerah.

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga, penguatan tersebut diwujudkan dengan mengaitkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan penanggulangan bencana dengan kontribusinya terhadap prioritas pembangunan daerah sesuai dengan urusan dan tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan kebutuhan penyesuaian pendanaan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp1.512.329.809 dari alokasi Rp2.896.044.427 atau 52,2 persen. Realisasi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan hasil penyesuaian anggaran terakhir, pagu pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 menjadi sebesar Rp3.377.963.727,00. Dengan demikian, terdapat penyesuaian sebesar Rp481.919.300,00 dibandingkan dengan pagu yang menjadi dasar evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp2.896.044.427,00. Penyesuaian tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 dan

menjadi dasar dalam pemantauan kecukupan pendanaan serta pencapaian target kinerja.

Selain evaluasi realisasi anggaran, dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pendanaan untuk mendukung keberlanjutan pelayanan penanggulangan bencana. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp211.919.300, yang terdiri atas tambahan sebesar Rp156.570.000 yang telah diakomodasi TAPD dan usulan tambahan sebesar Rp55.349.300 untuk memenuhi kebutuhan operasional lainnya.

Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khususnya dalam mendukung kesiapsiagaan, respons cepat darurat, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, serta dukungan operasional sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Dengan demikian, Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 disusun sebagai dokumen yang menjaga konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SPM, IKU dan IKK, serta rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023–2043;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2045;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 130 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023–2026;
23. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023–2026;
24. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 2024–2044;
25. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
27. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 000.7/613 tanggal 30 Juni 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
28. Surat Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 000.7/3282 tanggal 21 Agustus 2026 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sampai dengan akhir Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. menyesuaikan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026;
2. mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
3. mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;

4. menindaklanjuti hasil Reviu APIP dan Fasilitasi Gubernur terhadap dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
5. memperkuat keterkaitan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tematik Pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
6. mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
7. menjaga konsistensi antara Perubahan Rencana Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen penganggaran;
8. mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana; dan
9. menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan akhir Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3. Review terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026
- 3.2. Rencana Kerja Dukungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan, baik dari aspek pencapaian kinerja maupun realisasi anggaran. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan kebutuhan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2026.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pelayanan penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan maupun pada saat terjadi keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja, hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai kecukupan dukungan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2026. Berdasarkan hasil penyesuaian anggaran terakhir, pagu pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 menjadi sebesar Rp3.377.963.727,00, atau mengalami penyesuaian sebesar Rp481.919.300,00 dibandingkan dengan pagu yang menjadi dasar evaluasi Triwulan II sebesar Rp2.896.044.427,00.

Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penyesuaian rencana kerja dan pendanaan sampai dengan akhir Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana, serta kebutuhan

operasional dalam mendukung kesiapsiagaan dan respons penanggulangan bencana.

Beberapa komponen belanja yang berkaitan dengan dukungan operasional penanggulangan bencana sampai dengan 30 Juni 2026 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 TW II

Komponen Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d. Juni	Persentase
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp37.425.000	Rp14.578.600	39,0%
Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	Rp4.515.700	Rp1.030.000	22,8%
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp471.000.000	Rp180.250.000	38,3%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp29.570.000	Rp7.050.000	23,8%
Belanja Perjalanan Dinas	Rp95.726.000	Rp56.359.500	58,9%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 periode 1 Januari–30 Juni 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja yang mendukung operasional penanggulangan bencana masih berlangsung sampai dengan akhir Triwulan II. Beberapa komponen, seperti bahan bakar dan pelumas, suku cadang, jasa tenaga penanganan bencana serta pemeliharaan peralatan dan mesin, berkaitan langsung dengan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana.

Kebutuhan terhadap komponen tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh pola belanja rutin, tetapi juga dipengaruhi oleh kejadian bencana, kebutuhan respons cepat, mobilisasi personel dan armada, kondisi peralatan, serta kebutuhan pelayanan penyelamatan

dan evakuasi. Oleh karena itu, kecukupan anggaran sampai dengan akhir tahun perlu terus diperhatikan berdasarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan pelayanan di lapangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu melalui tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Penyelenggaraan tersebut diarahkan pada pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas masyarakat dan daerah, penanganan kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi, serta dukungan terhadap pemulihan pascabencana.

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana, yang meliputi:

1. pelayanan informasi rawan bencana;
2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu memastikan tersedianya dukungan sumber daya, personel, sarana dan prasarana serta sistem koordinasi yang memadai agar pelayanan dapat diberikan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Evaluasi kinerja pelayanan selanjutnya memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk indikator yang berkaitan dengan Indeks Ketahanan Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, serta indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 perlu terus diarahkan pada pencapaian target kinerja sampai dengan akhir tahun, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan, kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana, serta ketersediaan dan kecukupan pendanaan.

Selanjutnya, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II menjadi dasar dalam melakukan review terhadap

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian rencana kerja, serta merumuskan kebutuhan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan akhir Tahun 2026.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga perlu memastikan keberlanjutan pelayanan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi, sampai dengan pemulihan pascabencana.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan realisasi anggaran, serta kebutuhan penyesuaian rencana kerja dan pendanaan sampai dengan akhir Tahun 2026, terdapat beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu:

1. Penguatan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Kesiapsiagaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, peralatan serta dukungan operasional yang diperlukan sebelum dan pada saat terjadi bencana. Penguatan kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan risiko bencana dan kebutuhan pelayanan di lapangan.

2. Keberlanjutan pelayanan respons cepat terhadap kejadian bencana.

Karakteristik kejadian bencana yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi memerlukan kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan respons secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Ketersediaan dukungan operasional, personel, kendaraan, peralatan dan kebutuhan pendukung lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan respons cepat, khususnya dalam penanganan keadaan darurat.

3. Ketersediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan penanggulangan bencana.

Pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana membutuhkan sarana, prasarana dan peralatan yang siap digunakan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pemeliharaan peralatan, penyediaan suku cadang dan dukungan operasional kendaraan serta peralatan perlu menjadi perhatian agar kesiapan pelayanan tetap terjaga.

Hal tersebut juga tercermin dalam kebutuhan penyesuaian pendanaan Tahun 2026, antara lain untuk bahan bakar dan pelumas, suku cadang, serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu memastikan keberlanjutan pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal perlu didukung dengan perencanaan, sumber daya dan pendanaan yang memadai serta dilaksanakan secara terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana.

5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi memerlukan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat perlu terus dilakukan, terutama pada wilayah yang memiliki potensi risiko bencana.

6. Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, terutama dalam penyediaan sumber daya, penanganan keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, serta pemulihan. Penguatan koordinasi diperlukan agar

setiap sumber daya dapat dimobilisasi secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

7. Penyesuaian kebutuhan pendanaan dengan kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana.

Hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II menunjukkan perlunya memastikan kecukupan pendanaan sampai dengan akhir Tahun 2026. Kebutuhan tambahan anggaran yang telah diidentifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai Rp211.919.300,00, yang terdiri atas Rp156.570.000,00 yang telah diakomodasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Rp55.349.300,00 sebagai usulan tambahan.

Kebutuhan tersebut terutama berkaitan dengan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan operasional penanggulangan bencana, termasuk kebutuhan bahan bakar dan pelumas, suku cadang, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta dukungan kegiatan penanggulangan bencana lainnya.

8. Konsistensi perencanaan, kinerja dan penganggaran.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 perlu memastikan adanya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja, kebutuhan pelayanan, target kinerja, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, serta rencana pendanaan. Dengan demikian, setiap penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan pelayanan dan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

2.3 Review terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Dalam proses review terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penelaahan terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan membandingkan kondisi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dengan rencana kerja dan pendanaan yang tersedia.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa penyesuaian rencana kerja dan pendanaan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan penanggulangan bencana sampai dengan akhir Tahun 2026, terutama dalam mendukung kesiapsiagaan, respons cepat darurat, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta pemeliharaan sarana dan peralatan.

Berdasarkan hasil penyesuaian anggaran terakhir, total pagu pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 menjadi sebesar Rp3.377.963.727,00. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penyelarasan rencana kerja dan pendanaan dengan kebutuhan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Pada Program Penanggulangan Bencana, penyesuaian pendanaan diarahkan untuk mendukung:

- 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp18.623.200,00;
- 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp858.134.400,00;
- 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp250.746.940,00; dan
- 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sebesar Rp47.880.900,00.

Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan dasar sub-urusan bencana, pencapaian target kinerja, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta kesiapan sumber daya, sarana, prasarana dan peralatan penanggulangan bencana sampai dengan akhir Tahun 2026.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pendanaan, terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp211.919.300,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Tambahan yang telah diakomodasi TAPD	Rp156.570.000,00
Usulan tambahan kepada TAPD	Rp55.349.300,00
Total kebutuhan tambahan	Rp211.919.300,00

Kebutuhan tambahan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana, termasuk dukungan operasional kendaraan dan peralatan, penyediaan bahan bakar dan pelumas, kebutuhan suku cadang, serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

Adapun tambahan anggaran sebesar Rp156.570.000,00 yang telah diakomodasi dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah merupakan hasil penyesuaian terhadap kebutuhan pada beberapa subkegiatan pelayanan penanggulangan bencana, yaitu:

Subkegiatan	Tambahan Anggaran
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp15.420.000,00
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Rp79.728.000,00
Respon Cepat Darurat Bencana	Rp16.650.000,00
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp44.772.000,00
Total	Rp156.570.000,00

Selain tambahan yang telah diakomodasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp55.349.300,00. Usulan tambahan tersebut terdiri atas kebutuhan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp35.349.300,00, suku cadang sebesar Rp5.000.000,00, pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp10.000.000,00, serta penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp5.000.000,00.

Penyesuaian kebutuhan pendanaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan penanggulangan bencana. Kebutuhan tersebut perlu dilihat dalam konteks karakteristik pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang membutuhkan kesiapan sumber daya, kendaraan dan peralatan serta kemampuan mobilisasi secara cepat dalam menghadapi kejadian bencana.

Dengan demikian, hasil review terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 menunjukkan bahwa rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diarahkan untuk

menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja dan pelayanan dasar, sekaligus memastikan dukungan pendanaan terhadap kegiatan yang berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan, respons cepat, pencarian, pertolongan dan evakuasi, serta pemeliharaan sarana dan peralatan penanggulangan bencana.

Selain aspek pendanaan, penyelarasan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga dilakukan dengan memastikan bahwa rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan kontribusi terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2026 serta pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, sesuai dengan tugas dan fungsi serta indikator yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Substansi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil review tersebut, Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. mempertahankan dan meningkatkan pencapaian target pelayanan penanggulangan bencana;
2. memastikan pemenuhan SPM sub-urusan bencana;
3. memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap kejadian bencana;
4. menjaga ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan penanggulangan bencana;
5. menyesuaikan rencana pendanaan dengan kebutuhan pelayanan sampai dengan akhir Tahun 2026;
6. mendukung pencapaian IKU dan IKK sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan; dan
7. memberikan kontribusi terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar, khususnya pelayanan dasar pada sub-urusan bencana.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026, program, kegiatan dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan penanggulangan bencana melalui pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan pemulihan pascabencana.

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026, dukungan tersebut antara lain dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana, yang mencakup:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Salatiga, seluruh kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dukungan terhadap tematik pembangunan tersebut dilaksanakan melalui keterkaitan antara program, kegiatan dan

subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pelayanan dasar, pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, respons cepat, penyelamatan dan evakuasi, serta pemulihan pascabencana.

No.	Dukungan Tematik Pembangunan	Bentuk Dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program/Kegiatan Pendukung
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar	Pemenuhan pelayanan dasar sub-urusan bencana	Program Penanggulangan Bencana
2	Pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan bencana	Informasi rawan bencana, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3	Peningkatan kualitas pelayanan pada saat terjadi bencana	Respons cepat, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4	Penguatan sistem penanggulangan bencana	Penataan sistem dasar, koordinasi, kelembagaan dan pemulihan pascabencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaannya, dukungan tersebut tetap diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 serta target kinerja Tahun 2026.

3.2 Rencana Kerja Dukungan Pencapaian IKU dan IKK

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci disusun dengan mengacu pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029 adalah:

“Menurunnya risiko bencana melalui ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.”

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran:

- 1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana; dan
- 2. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana..

Berdasarkan Rencana Strategis final terbaru, target Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 meliputi:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
1	Menurunnya risiko bencana melalui ketahanan daerah terhadap perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Angka	72,52
2	Menurunnya risiko bencana melalui ketahanan daerah terhadap perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Angka	0,69
3	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan sosialisasi, KIE, simulasi dan informasi rawan bencana	Orang	1.304
4	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Pengkajian risiko bencana dan perencanaan secara terpadu	Dokumen	1
5	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	%	100
6	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah korban yang berhasil dievakuasi dan diselamatkan	Orang	8.511
7	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Pengembangan Sistem Dasar dan Pemulihan Pascabencana	%	100

Dukungan terhadap Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut didukung melalui pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, antara lain pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Keterkaitan antara indikator dengan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

No.	IKU	Target 2026	Dukungan Rencana Kerja
1	Indeks Risiko Bencana	72,52	Pengurangan risiko, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
2	Indeks Ketahanan Daerah	0,69	Penguatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan sistem penanggulangan bencana
3	Warga yang mendapatkan sosialisasi, KIE, simulasi dan informasi rawan bencana	1.304 orang	Pelayanan informasi rawan bencana dan edukasi kebencanaan
4	Pengkajian risiko bencana dan perencanaan secara terpadu	1 dokumen	Pengkajian risiko dan perencanaan kebencanaan
5	Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	100%	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
6	Korban yang berhasil dievakuasi dan diselamatkan	8.511 orang	Respons cepat, pencarian, pertolongan dan evakuasi
7	Pengembangan sistem dasar dan pemulihan pascabencana	100%	Penataan sistem dasar dan pemulihan pascabencana

Dukungan terhadap Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada sub-urusan bencana.

Berdasarkan Rencana Strategis final, Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 meliputi:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2026
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1.304
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	770

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2026
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	8.511

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan akhir Tahun 2026. Pencapaian target dilakukan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka memastikan kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan terhadap kesesuaian perubahan program, kegiatan dan subkegiatan dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2025–2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.

Pengendalian juga mencakup kesesuaian target kinerja, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan kebutuhan pendanaan yang mengalami perubahan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana sampai dengan akhir Tahun 2026.

Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar untuk memastikan bahwa Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 tetap konsisten dengan dokumen perencanaan daerah, berorientasi pada pencapaian target kinerja, mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga dituangkan dalam Formulir E.70 sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dituangkan dalam Formulir E.70, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 telah memperhatikan tahapan perencanaan, keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta kesesuaian indikator, target kinerja dan pendanaan.

Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bagian dalam penyempurnaan rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan akhir Tahun 2026.

Rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II, hasil review terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025–2029, serta kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana sampai dengan akhir Tahun 2026.

Berdasarkan matriks Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 dan hasil penyesuaian anggaran terakhir, total pagu pendanaan Perangkat Daerah menjadi sebesar Rp3.377.963.727,00. Pagu tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pagu target penyesuaian Tahun 2026 sebesar Rp2.202.578.287,00. Sementara itu, pada Program Penanggulangan Bencana, total pagu target penyesuaian sebesar Rp1.175.385.440,00, yang diarahkan untuk mendukung pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Adapun rincian pagu target penyesuaian pada Program Penanggulangan Bencana adalah:

- 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp18.623.200,00;
- 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp858.134.400,00;
- 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp250.746.940,00; dan
- 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sebesar Rp47.880.900,00.

Penyesuaian pendanaan tersebut diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan penanggulangan bencana, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, serta menjaga kesiapan sumber daya, kendaraan operasional, sarana, prasarana dan peralatan penanggulangan bencana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Selain penyesuaian dalam matriks Perubahan Rencana Kerja, berdasarkan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Nomor 900.1.1.4/369 tanggal 10 Agustus 2026, terdapat kebutuhan tambahan anggaran yang telah diakomodasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp156.570.000,00, sedangkan masih terdapat usulan tambahan sebesar Rp55.349.300,00 yang belum diakomodasi.

Dengan demikian, total kebutuhan tambahan yang telah diidentifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp211.919.300,00.

Rincian tambahan yang telah diakomodasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah:

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Tambahan
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp15.420.000
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Rp79.728.000
3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp16.650.000
4	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp44.772.000
	Total	Rp156.570.000

Sedangkan usulan tambahan yang belum diakomodasi terdiri atas:

No.	Kebutuhan	Usulan Tambahan
1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	35,349,300
2	Belanja Suku Cadang	5,000,000
3	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000
	Total	55,349,300

Kebutuhan tambahan tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi, kebutuhan bahan bakar minyak operasional sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, karakteristik pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersifat siaga 24 jam dan responsif, serta kebutuhan menjaga kesiapan kendaraan, peralatan dan personel dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana.

Kendaraan operasional merupakan salah satu unsur vital dalam penyelenggaraan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menjadi bagian yang sangat menentukan dalam kecepatan mobilisasi personel, peralatan, bantuan, serta pelaksanaan respons terhadap kejadian bencana. Oleh karena itu, dukungan anggaran tidak hanya diperlukan untuk pemenuhan bahan bakar minyak, tetapi juga untuk pemeliharaan kendaraan secara berkala, perbaikan, servis, serta penyediaan suku cadang dan komponen yang diperlukan agar kendaraan dan peralatan selalu dalam kondisi siap operasional.

Ketersediaan anggaran tersebut menjadi penting mengingat kendaraan dan peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus siap digunakan setiap saat, sehingga kondisi laik dan kesiapan

operasionalnya perlu dijaga secara berkelanjutan sebagai bagian dari kesiapsiagaan dan keberlangsungan pelayanan penanggulangan bencana.

Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan dasar sub-urusan bencana, pencapaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, pemenuhan kebutuhan operasional, serta terjaganya kesiapan sumber daya, kendaraan operasional, sarana, prasarana dan peralatan dalam mendukung pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, pencarian, pertolongan dan evakuasi, serta penanganan pascabencana.

Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga diarahkan untuk memastikan ketersediaan dukungan operasional sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, termasuk kebutuhan bahan bakar dan pelumas, pemeliharaan dan servis kendaraan serta peralatan, penyediaan suku cadang, dan kebutuhan operasional lainnya yang mendukung kesiapsiagaan dan kecepatan respons Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rincian program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu pendanaan dituangkan dalam Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari penyesuaian perencanaan dan pendanaan Perangkat Daerah terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Perubahan Rencana Kerja ini menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana, pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, serta dukungan terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2026.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja perlu dilakukan secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana di Kota Salatiga. Mengingat karakteristik penanggulangan bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan dan kemampuan respons setiap saat, dukungan terhadap personel, kendaraan operasional, sarana, prasarana, peralatan, bahan bakar, pemeliharaan, servis dan suku cadang perlu dijaga agar pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berlangsung secara cepat dan optimal.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengendalian pencapaian target kinerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Setiap perubahan dan penyesuaian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kemampuan keuangan daerah, serta hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 tidak hanya ditentukan oleh pencapaian realisasi anggaran, tetapi juga oleh tercapainya kinerja pelayanan penanggulangan bencana, meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas daerah, serta kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terkoordinasi kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, diharapkan seluruh rencana kerja dan pendanaan yang telah disesuaikan dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tangguh, responsif dan berkelanjutan di Kota Salatiga.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 diarahkan pada upaya memastikan keberlanjutan pencapaian target kinerja dan pelayanan penanggulangan bencana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II, kebutuhan pelayanan di lapangan, ketersediaan dan kecukupan pendanaan, serta hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja.

Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan melanjutkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan penguatan kesiapsiagaan, respons cepat terhadap kejadian bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana.

Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan tersebut, tindak lanjut juga dilakukan melalui pemenuhan dan pemeliharaan kesiapan personel, kendaraan operasional, sarana, prasarana dan peralatan

penanggulangan bencana, termasuk ketersediaan bahan bakar dan pelumas, suku cadang serta pemeliharaan dan servis kendaraan dan peralatan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemampuan mobilisasi dan respons cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi kejadian bencana yang bersifat dinamis dan tidak dapat sepenuhnya diprediksi.

Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan melakukan pemantauan terhadap kecukupan pendanaan sampai dengan akhir Tahun 2026 serta menindaklanjuti kebutuhan tambahan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Pengendalian dilakukan agar pelaksanaan anggaran tetap konsisten dengan target kinerja, kebutuhan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Hasil pelaksanaan dan pengendalian tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pada periode berikutnya, sehingga terdapat kesinambungan antara hasil evaluasi, kebutuhan pelayanan, pencapaian kinerja dan perencanaan serta penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Salam Tangguh....

Salam Kemanusiaan....

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Lampiran 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.0.00.0.00.33.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							3.327.957.000,00	2.896.044.427,00	3.052.614.427,00	-275.342.573,00							4.436.750.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.327.957.000,00	2.896.044.427,00	3.052.614.427,00	-275.342.573,00							4.436.750.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PENJUNJINGAN MASYARAKAT							3.327.957.000,00	2.896.044.427,00	3.052.614.427,00	-275.342.573,00							4.436.750.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD				100 88 % nilai 65 88 Nilai nilai 88 % 88 nilai	100 88 % nilai 65 88 Nilai nilai 88 % 88 nilai	1.987.496.000,00	1.861.808.987,00	1.877.228.987,00	-110.267.013,00					BMD Perangkat Daerah BPBD Kota Salatiga PNS BPBD Kota Salatiga PNS, Pustalops dan TRC di BPBD Kota Salatiga		2.516.750.000,00	
		[Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 71 88.81	100 63 86	100 64 87			1.987.496.000,00	1.861.808.987,00	1.877.228.987,00	-110.267.013,00						100 65 88	2.516.750.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.268.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	-3.115.000,00							6.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	4.268.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	-3.115.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	1.551.354.000,00	1.696.131.287,00	1.711.551.287,00	160.197.287,00							1.817.500.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.536.939.000,00	1.687.068.287,00	1.687.068.287,00	150.129.287,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	6 Dokumen	14.415.000,00	9.063.000,00	24.483.000,00	10.068.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00							14.000.000,00	
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah				100 %	100 %	140.112.000,00	54.604.000,00	54.604.000,00	-85.508.000,00							173.250.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	-5.580.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.721.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00	-4.804.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.546.000,00	13.891.000,00	13.891.000,00	-16.655.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.981.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-4.381.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	3 Laporan	6.170.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-4.220.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	78.634.000,00	30.326.000,00	30.326.000,00	-48.308.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			95.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	20.486.000,00	0,00	0,00	-20.486.000,00							60.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.486.000,00	0,00	0,00	-20.486.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	44.276.000,00	22.010.000,00	22.010.000,00	-22.266.000,00							51.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	0 Laporan	796.000,00	0,00	0,00	-796.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10 Laporan	43.480.000,00	22.010.000,00	22.010.000,00	-21.470.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	220.000.000,00	87.910.700,00	87.910.700,00	-132.089.300,00							395.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	35.640.000,00	35.640.000,00	-24.360.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	42.150.700,00	42.150.700,00	-47.849.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6 Unit	20.000.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00	-9.880.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan da Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Bencana				100 %	100 %	1.340.461.000,00	1.034.235.440,00	1.175.385.440,00	-165.075.560,00					Warga Salatiga Warga Salatiga, pentahelix, perangkat daerah dan instansi vertikal		1.920.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	-	-	-	-			883.841.000,00	797.029.600,00	876.757.600,00	-7.083.400,00						-	1.240.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya layanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota				100 %	100 %	52.030.000,00	18.623.200,00	18.623.200,00	-33.406.800,00							65.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				480 Orang	150 Orang	52.030.000,00	18.623.200,00	18.623.200,00	-33.406.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan terlaksananya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana				100 %	100 %	831.811.000,00	778.406.400,00	858.134.400,00	26.323.400,00							1.175.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				150 Orang	180 Orang	46.011.000,00	11.114.600,00	11.114.600,00	-34.896.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100 Keluarga	50 Keluarga	40.000.000,00	13.317.000,00	13.317.000,00	-26.683.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	3 Kawasan	50.000.000,00	24.165.800,00	24.165.800,00	-25.834.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				100 Orang	100 Orang	46.960.000,00	20.132.000,00	20.132.000,00	-26.828.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	600.000.000,00	697.000.000,00	776.728.000,00	176.728.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			850.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	1 Kawasan	48.840.000,00	12.677.000,00	12.677.000,00	-36.163.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana]	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	100	100	100			161.620.000,00	47.880.900,00	47.880.900,00	-113.739.100,00						100	255.000.000,00	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan layanan pascabencana dan penguatan sistem dasar penanggulangan bencana Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				% 100 %	% 100 %	161.620.000,00	47.880.900,00	47.880.900,00	-113.739.100,00							255.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				4 Laporan	1 Laporan	44.705.000,00	10.292.800,00	10.292.800,00	-34.412.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				10 Kegiatan	5 Kegiatan	54.360.000,00	27.234.700,00	27.234.700,00	-27.125.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				4 Dokumen	1 Dokumen	45.305.000,00	10.353.400,00	10.353.400,00	-34.951.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				4 Dokumen	0 Dokumen	17.250.000,00	0,00	0,00	-17.250.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya penanganan bencana pada saat tangapan darurat]	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100	100			295.000.000,00	189.324.940,00	250.746.940,00	-44.253.060,00						100	425.000.000,00	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 %	100 %	295.000.000,00	189.324.940,00	250.746.940,00	-44.253.060,00							425.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				6 Dokumen	6 Dokumen	175.000.000,00	111.532.300,00	128.182.300,00	-46.817.700,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	31.742.000,00	76.514.000,00	26.514.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				20 Orang	6 Orang	45.000.000,00	21.050.640,00	21.050.640,00	-23.949.360,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			J U M L A H						3.327.957.000,00	2.896.044.427,00	3.052.614.427,00	-275.342.573,00							4.436.750.000,00		

Lampiran 2

**SK TIM RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA**



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7/422

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SALATIGA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Penetapan dan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga;
 - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Penetapan dan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga;
 - c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Penetapan dan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Penetapan dan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Penetapan dan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga tepat waktu;
 - g. melaporkan hasilnya pada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA,

ROY ANZAR MIFTACHUL UMAMI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 000.7/422
TANGGAL : 15 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SALATIGA

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana	Penanggung jawab
2.	Kepala Sekretariat	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logisik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana pada BPBD Kota Salatiga	Anggota

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA, 

ROYANJAR MIFTACHUL UMAMI

Lampiran 3

FORMULIR E.60 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul
2. Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital
4. Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program		Satu an	Target Akhir RPJMD Kota Salatiga (Tahun 2030)	Basel ine (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2026) Yang Dievaluasi	Target Penyesuaian Tahun 2026	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2026	Perangkat Daerah Pengampu		
											I						II	
		Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)								K	Rp					K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19		
		1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN AN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Realisasi Belanja Pegawai													BPBD		
			Realisasi Belanja Barang dan Jasa															
1		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100%	100%	2,879,088,000	100%		100%						50%	50.00%		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88	88.8	2,879,088,000	85,91								88.90	100.10%		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	71	2,879,088,000	63,00								63.15			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		1.05.01.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan		6	6	4,146,000		6	1,153,000	6	1,153,000	726,100	-	726,100.0	63%	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang			11	1,576,016,908		11	1,687,068,287	11	1,957,068,287	485,549,790	456,178,245	941,728,035.0	48%	
		1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumentasi			12	14,400,000		12	9,063,000	12	24,483,000			0%		
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	dokumentasi														
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket			1	2	3,049,614		1	1,920,000	1	1,920,000		-	0%	
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket			1	1	4,782,602		1	2,917,000	1	2,917,000		-	0%	
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket			3	3	27,829,300		3	13,891,000	3	13,891,000		10,315,548	74%	
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket			2	2	4,364,100		2	3,600,000	2	3,600,000			0%	
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumentasi			12											
		1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			3	2	1,024,000		4	1,950,000	4	1,950,000		180,000	9%	
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			12	5	24,015,060		12	30,326,000	12	30,326,000	834,500	4,525,000	5,359,500.0	18%
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit			2	3	74,493,280									

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program		Satu an	Target Akhir RPJMD Kota Salatiga (Tahun 2030)		Basel ine (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Target Penyesuaian Tahun 2026		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2026		Perangkat Daerah Pengampu
																	I		II								
		Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)														K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		16		17		18		19	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lapor an			12	2	525,200																		
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lapor an			12	12	27,523,138			12	22,010,000	12.00	27,010,000		6,478,326		5,473,762		11,952,088.0		44%				
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit			2	2	37,614,300			2	35,640,000	2.00	35,640,000		2,651,000		3,936,000		6,587,000.0		18%				
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit			4	5	41,337,100			4	42,150,700	4.00	92,500,000		1,520,500		13,720,100		15,240,600.0		16%				
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit			9	15	12,525,000			15	10,120,000	15.00	10,120,000		-		2,500,000		2,500,000.0		25%				
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit			1	1	190,929,550			1															
2		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																								
			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100%		100%			100%														25%	25%		
			Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	100%		100%			100%														25%	25%		
			Persentase Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100%		100%			100%														100%	100%		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																								
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	orang				320	38,837,400			1304 orang	18,623,200	1304	18,623,200				13,000,000		13,000,000.0		70%				
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																								
		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	kegia tan				295	53,323,200			1 kegiatan	11,114,600	1.00	11,114,600				6,281,150		6,281,150.0		57%				
		1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	peser ta				180	39,256,100			45 peserta	13,317,000	45.00	13,317,000								0%				
		1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawa san				1	29,616,700			1 kawasan	24,165,800	1.00	24,165,800								0%				
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	orang				180	70,551,100			10 orang	20,132,000	10.00	20,132,000				10,310,000		10,310,000.0		51%				
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	unit				12	759,512,500			1 unit	697,000,000	1.00	776,728,000		147,700,018		185,482,670		333,182,688.0		43%				

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program		Satu an	Target Akhir RPJMD Kota Salatiga (Tahun 2030)		Basel ine (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Target Penyesuaian Tahun 2026		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2026	Perangkat Daerah Pengampu
		Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)													K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19					
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	kegia tan			2 29,643,100			1 kegiatan	12,677,000	1.00 12,677,000			11,465,000	11,465,000.0		90%			
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	doku men			12 39,312,800			96 dokumen	111,532,300	96.00 128,182,300		408,000	95,850,600	96,258,600.0		75%			
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	kegia tan			10 846,000			1 kegiatan	31,742,000	1.00 76,514,000		5,461,000	6,953,000	12,414,000.0		16%			
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	paket			13 510,000			Sesuai kebutuha n	21,050,640	21,050,640			9,282,000	9,282,000.0		44%			
		1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	doku men						6 dokumen	25,000,000	6.00 25,000,000			16,372,500	16,372,500.0		65%			
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																		
		1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	lapor an			4 3,560,400			4 laporan	10,292,800	4.00 10,292,800			6,600,000	6,600,000.0		64%			
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	kegia tan			2 3,575,500			10 kegiatan	27,234,700	10.00 27,234,700			2,575,000	2,575,000.0		9%			
		1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	doku men						4 laporan	10,353,400	4.00 10,353,400						0%			
		1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	doku men						4 dokumen	-	4.00 -									
							3,113,119,952				2,896,044,427	3,377,963,727		651,329,234		1,512,329,809					

CATATAN PENGISIAN

- Struktur program, kegiatan dan subkegiatan disusun sesuai Renja BPBD Kota Salatiga Tahun 2026.
- Realisasi per subkegiatan sampai dengan Triwulan II tidak diestimasi; kolom realisasi dibiarkan kosong apabila belum tersedia data yang dapat dibuktikan.
- Realisasi program pada kolom Triwulan II mempertahankan data yang sudah terdapat pada template.
- Data setelah 30 Juni 2026 tidak dimasukkan sebagai realisasi Triwulan II.

- Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:** koordinasi dan sinergi lintas Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan, kesiapan personel, kendaraan dan peralatan, serta dukungan sarana, prasarana dan operasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:** karakteristik kejadian bencana yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi menyebabkan kebutuhan pelayanan dan operasional bersifat dinamis, sehingga kecukupan dukungan anggaran, bahan bakar, suku cadang serta pemeliharaan kendaraan dan peralatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan sampai dengan akhir Tahun 2026.
- Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya:** melanjutkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai target kinerja, memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap kejadian bencana, serta memastikan ketersediaan dan kesiapan personel, kendaraan operasional, sarana, prasarana, peralatan, bahan bakar, pemeliharaan dan suku cadang sampai dengan akhir Tahun 2026.
- Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya:** melakukan penyesuaian perencanaan dan pendanaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana, pemenuhan SPM sub-urusan bencana, pencapaian IKU dan IKK, serta kebutuhan kesiapsiagaan dan keberlanjutan pelayanan penanggulangan bencana.

Lampiran 4

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempur naan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	v			
2.	Pengolahan data dan informasi.	v			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	v			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	v			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	v			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	v			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	v			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	v			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempur naan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	v			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	v			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	v			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	v			

Salatiga, 31Agustus 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA

SUTARTO, S.H.
NIP. 19730313 199603 1002

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Lampiran 5

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2026**

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 10 Tahun 2025, paling sedikit memuat 4 (empat) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2026;
 3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 4. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan Perubahan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Perubahan Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada Perubahan RKPD di tetapkan.

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Salatiga

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga

SUTARTO, SH
NIP. 19730313 199603 1002

AZIS MUSLIM, SE, MM
NIP. 19740217 200501 1 005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

Formulir Verifikasi Sistematika PERUBAHAN RENJA 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	V		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V		
I.3	Maksud dan tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.	V		
I.4	Sistematika penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026					
II.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, serta realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.	V		
II.2	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.	V		
II.3	Review terhadap Perubahan RKPD Tahun	Memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang dapat di akses pada link https://bit.ly/perubahan26sl3 .	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
	2026				
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
III.1	Tematik Pembangunan 2026	Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal lainnya (direktif pemerintah), antara lain tentang : a. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN) b. Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Salatiga c. Dukungan terhadap pelaksanaan SPM d. Dukungan terhadap Penurunan Stunting e. Dukungan terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrim f. Dukungan terhadap Pelaksanaan SDG's	V		
III.2	Indikator Kinerja Utama PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Uraian tentang upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang diukur melalui IKU, dan IKK dengan mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah pada TW II Tahun 2026	V		
III.3	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun rencana ditampilkan pada tabel	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Keziata serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Memperhatikan indikator kinerja yang telah di tetapkan pada Renstra PD dan RPJMD 2025-2029.			
BAB IV PENUTUP					
IV	Penutup	Berisikan uraian penutup, berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.		V	Belum ada RTL